

PENGELOLAAN BERSAMA KAWASAN HUTAN SESAOT BERBASIS MASYARAKAT

Oleh :

Baharuddin, Kurniawan
Dosen Universitas 45 Mataram

Abstrak : Kawasan hutan Sesaot merupakan Hutan Lindung dan merupakan daerah tangkapan air yang memegang peranan strategis bagi penyediaan air bagi masyarakat hulu sampai hilir. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan Sesaot, menyebabkan kawasan tersebut terus menerus mengalami degradasi. Masyarakat yang mengelola kawasan hutan sesaot membentuk kelompok besar, seperti Wana Dharma, Wana Lestari, Wana Abadi, KKMPH, dan Forum Kawasan. Pengelolaan sumber daya hutan dilakukan dengan menyusun perencanaan kawasan. Perencanaan yang tepat dan baik diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan hutan berjalan dengan lancar berdasarkan prinsip-prinsip konservasi. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan, dimana saat ini arah program tidak lagi di arahkan pada proses pemberian hak konsesi saja, tetapi juga diarahkan pada upaya pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan. Metode *Focus Group Discussion* dengan melibatkan peserta yang berasal dari anggota kelompok besar sebanyak 71 orang selama 3 hari dari tgl 11-13 Agustus 2014. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kehutanan di daerah kawasan hutan merupakan elemen utama dalam implementasi kebijakan disektor kehutanan. Konsep perencanaan yang disusun harus meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Sistem perencanaan partisipatif oleh berbagai pihak banyak dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, khususnya di bidang kehutanan. Perencanaan partisipatif merupakan sebuah konsep perencanaan yang melibatkan semua masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki. Inisiasi pengembangan perencanaan partisipatif sedang di gagas oleh masyarakat di kawasan hutan sesaot kabupaten Lombok Barat. Perencanaan tersebut dikemas dalam bentuk perencanaan ditingkat kawasan yang mengelaborasi semua kepentingan kelompok masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Perencanaan yang disusun menjadi pedoman dan membimbing perencanaan yang selama ini masih disusun secara parsial oleh masyarakat. Kelompok besar yang ada didalam kawasan hutan sesaot memiliki perencanaan sendiri-sendiri dan secara subtransi perencanaan masing-masing kelompok sama jenis kegiatan dan kebutuhannya.

Kata kunci : Hutan sesaot, perencanaan bersama

PENDAHULUAN

Berdasarkan SK Menhut Nomor 677/Kpts-II/1998, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan milik Negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No: 445/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009, 185 hektar kawasan hutan di Sesaot yang terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Narmada sudah mendapatkan Ijin Usaha untuk Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan masa konsesi selama 35 tahun. Hal tersebut menjadikan kawasan hutan Sesaot sebagai sumber mata pencaharian oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan sesaot.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan Sesaot,

menyebabkan kawasan tersebut terus menerus mengalami degradasi. Kawasan hutan Sesaot memiliki status sebagai hutan Lindung. Oleh karena itu hutan Sesaot memiliki fungsi melindungi daerah tangkapan yang menyediakan air bersih, mengurangi kerusakan akibat banjir, dan menstabilkan lereng untuk mencegah longsor. Selain itu, fungsi lainnya adalah sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan sarana pendidikan dan penelitian. Berbagai macam tanaman, baik kayu-kayuan maupun tanaman multipurpose trees (MPTS) menjadikan kawasan hutan Sesaot juga sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar kawasan. Upaya pengembangan ilmu pengetahuan juga dilakukan oleh masyarakat dengan membangun laboratorium lapangan di kawasan hutan Sesaot. Kawasan hutan Sesaot juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

yang berada di sekitarnya. Misalnya menjadi pengelola kawasan hutan Sesaot sebagai tempat wisata.

Adanya kawasan hutan Sesaot tentunya mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian hutan. Salah satunya adalah dengan membentuk kelompok-kelompok besar, seperti Wana Dharma, Wana Lestari, Wana Abadi, KKMPH, dan Forum Kawasan. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut sangatlah penting dalam mengelola kawasan hutan Sesaot. Pengelolaan sumber daya hutan dilakukan dengan menyusun perencanaan kawasan. Perencanaan yang tepat dan baik diperlukan agar pelaksanaan pengelolaan hutan berjalan dengan lancar berdasarkan prinsip-prinsip konservasi. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan, dimana saat ini arah program tidak lagi di arahkan pada proses pemberian hak konsesi saja, tetapi juga diarahkan pada upaya pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program kerja kelompok besar belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari hasil klarifikasi peta blok, dimana masih ada lahan yang kritis, rawan longsor dan erosi, serta *illegal logging*. Permasalahan yang dihadapi kawasan hutan sesaot dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu permasalahan kawasan dan permasalahan pengelolaan. Permasalahan kawasan berupa kondisi tapal batas kawasan tidak jelas, perambahan hutan, pencurian kayu, perburuan liar, pengembalaan ternak, penanggulangan kebakaran. Jika dilihat permasalahan ini semua merupakan tekanan yang dihadapi sebuah kawasan dari masyarakat sekitar. Permasalahan kedua adalah pengelolaan berupa sumberdaya manusia pengelola yang masih terbatas, koordinasi yang tidak berjalan dan pengelolaan yang tumpang tindih, minimnya sarana dan prasarana, minimnya pendanaan dan belum adanya perencanaan yang mantap terhadap kawasan secara terpadu.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut perlu disusun Program bersama tingkat kawasan dalam rangka membantu kelompok-kelompok besar pengelola kawasan hutan Sesaot dengan tetap memegang prinsip konservasi. Dengan memaduserasikan program-program yang sudah dibuat menjadi acuan bagi kelompok-kelompok besar dalam mengelola kawasan hutan Sesaot.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Paradigma Kerjasama Pengelolaan Sumberdaya

Dilihat dari sejarahnya pengelolaan sumberdaya telah mengalami beberapa pergeseran

model dari yang bersifat sederhana menuju pada kolaborasi pengelolaan antar stakeholder (Nikijuluw 2002). Lebih lanjut Nikijuluw (2002) menyatakan dinyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya milik bersama merupakan model pengelolaan *pertama* atau yang paling tradisional. Kondisi ini memungkinkan karena kelimpahan sumberdaya dengan jumlah pengelola yang relatif sedikit sehingga setiap orang memiliki akses terbuka terhadap sumberdaya tersebut.

Paradigma *kedua* adalah pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat (PSBM) yang secara definitif dapat diterjemahkan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggungjawab dan kesempatan pada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan dan aspirasinya. PSBM menyangkut pula pemberian tanggungjawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan mereka. Masyarakat dalam konteks ini adalah komunitas atau kelompok dengan tujuan yang sama. Peran pemerintah adalah mendorong dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dan memproses gagasan-gagasan masyarakat kedalam bentuk kelembagaan. Keberhasilan pelaksanaan PSBM dapat ditentukan oleh beberapa hal pokok menurut Nikijuluw (2002) yaitu 1) Adanya kepercayaan diantara anggota masyarakat. Kepercayaan ini biasanya sangat kuat karena umumnya merupakan tradisi, 2) Tertulis atau tercatatnya aturan agar dapat memperkenalkannya pada generasi berikut, 3) Teknologi yang digunakan merupakan teknologi lokal yang telah umum difahami dan dipraktekkan, 4) Otonomi pengelolaan oleh masyarakat anggota. Keunggulan PSBM adalah mudah dijalankan karena sesuai aspirasi dan budaya lokal, diterima masyarakat lokal dan lebih mudah pengawasannya. Namun demikian terdapat juga beberapa kelemahan didalamnya yaitu tidak mengatasi masalah interkomunitas, bersifat lokal, mudah dipengaruhi faktor eksternal, sulit mencapai skala ekonomi karena hanya melibatkan anggota dan tingginya biaya.

Paradigma *ketiga* adalah pengelolaan sumberdaya oleh pemerintah (POP) yang dilakukan dengan alasan efisiensi, keadilan dan alasan administratif. POP dilaksanakan karena pada prinsipnya seluruh negara melakukan pengelolaan sumberdaya diwilayahnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya selain keuntungan berupa efisiensi terdapat beberapa kelemahan POP yang umum terjadi antara lain kegagalan pemerintah dalam mencegah *over exploitation* sumberdaya karena kelambatan regulasi, kesulitan dalam penegakan

hukum, kebijakan yang kurang tepat atau saling bertentangan satu dengan lainnya, wewenang yang terbagi dalam beberapa lembaga atau departemen, data dan informasi yang kurang tepat/akurat dan kegagalan dalam merumuskan keputusan manajemen.

Paradigma pengelolaan *keempat* adalah kolaborasi pengelolaan atau *co-management* yang didefinisikan sebagai pembagian atau pendistribusian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya (Nikijuluw 2002). Definisi lain dikemukakan oleh NRTEE (1998) yang menyatakan bahwa *co-management* merupakan pembagian atau pendistribusian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat, dunia usaha dengan masyarakat ataupun LSM dengan masyarakat dalam mengelola sumberdaya. Berdasarkan definisi tersebut maka masyarakat dengan mitra *co-management*-nya harus secara bersama-sama bertanggungjawab dalam melakukan seluruh tahapan pengelolaan. Nikijuluw (2002), bahwa *co-management* adalah suatu situasi dimana dua aktor atau lebih bernegosiasi untuk mendefinisikan dan menjamin pembagian yang adil (*fair sharing*) terhadap fungsi manajemen, pembagian hak dan tanggung jawab pada wilayah atau area tertentu atau sumberdaya alam tertentu. *Co-management* memiliki empat elemen penting yaitu : Multi aktor dengan kepentingan masing-masing, ada konsensus/ kesepakatan dan komitmen, ada proses negosiasi antar pihak, memegang prinsip-prinsip transparansi dan berkeadilan. Diperlukan kejujuran dan transparansi untuk memunculkan kepercayaan dari masyarakat (Fukuyama 1999).

Konsep *co-management* terdapat prinsip tanggung jawab yang harus dilakukan, hal ini memungkinkan setiap masyarakat untuk bertindak sesuai dengan wewenang tersebut (Bourdieu 1986). Apa yang menjadi tanggungjawab dan wewenang masing-masing pihak menentukan tipe atau bentuk kolaborasi yang dianut. Dalam hal ini, kerjasama merupakan inti dari *co-management*. Dari beberapa praktek yang telah dilakukan, secara hirarki *co-management* dapat ditentukan sebagai berikut (Nikijuluw 2002): Instruktif, konsultatif, kooperatif, advokasi atau pendampingan dan informative.

Permasalahan yang dihadapi kawasan hutan sesaat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu permasalahan kawasan dan permasalahan pengelolaan. Permasalahan kawasan berupa kondisi tapal batas kawasan tidak jelas, perambahan hutan, pencurian kayu, perburuan liar, pengembalaan ternak, penanggulangan kebakaran. Jika dilihat permasalahan ini semua merupakan tekanan yang dihadapi sebuah kawasan dari

masyarakat sekitar. Permasalahan kedua adalah pengelolaan berupa sumberdaya manusia pengelola yang masih terbatas, koordinasi yang tidak berjalan dan pengelolaan yang tumpang tindih, minimnya sarana dan prasarana, minimnya pendanaan dan belum adanya perencanaan yang mantap terhadap kawasan secara terpadu.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena (1) melalui partisipasi masyarakat, dapat diperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal, (2) bahwa masyarakat lebih mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka lebih mengerti seluk beluk program tersebut dan akan memiliki program tersebut, (3) adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Saharuddin dan Sumardjo, 2004).

c. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Konflik pengelolaan sumberdaya hutan yang sering terjadi yakni konflik antara masyarakat di dalam atau pinggir hutan dengan berbagai pihak di luar hutan yang dianggap memiliki otoritas dalam mengelola sumberdaya hutan. Konflik antar kelompok masyarakat jarang terjadi karena dalam kelompok masyarakat pada dasarnya sudah mengenal batas-batas wilayah masing-masing dalam mengambil sumberdaya hutan (Markum *et al.* 2004).

Hugo van der Merwe (1997) diacu dalam Fisher *et al.* (2000) mengemukakan teori mengenai penyebab konflik yaitu ; 1) *Teori Hubungan Masyarakat*: teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, 2) *Teori Negosiasi Prinsip* menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang mengalami konflik., 3) *Teori Kebutuhan Manusia* berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi, 4) *Teori Transformasi Konflik* berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Penanganan konflik dapat dilakukan melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas, penentuan prioritas serta pengenalan prosedur yang lebih baik dari yang sebelumnya. Metode

penanganan konflik yang dapat digunakan adalah menyerahkan persoalan kepada lembaga atau kelompok yang lebih tinggi tingkatannya serta menciptakan kesadaran dan pengertian pihak yang terlibat bahwa sumberdaya tersebut untuk kepentingan bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestariannya, (Markum 2001).

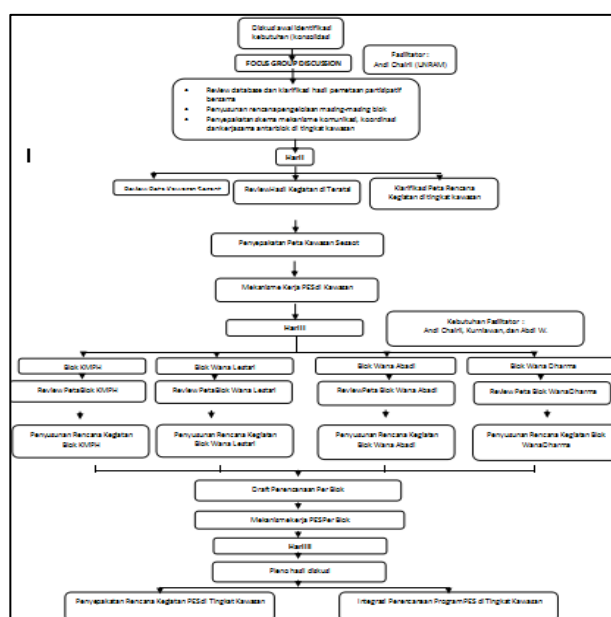
Konflik antar pelaku yang berkepentingan pada derajat tertentu akan merusak interaksi antar pelaku yang bersangkutan. Hal ini bermuara pada pembagian terhadap aspek pelestarian sumberdaya hutan yang bersangkutan. Karena itu pengadaptasian praktek manajemen kolaboratif merupakan bentuk yang perlu dikembangkan. Pemerintah dan masyarakat lokal memiliki kepentingan yang sama dalam pengelolaan sumberdaya hutan, yaitu menginginkan produktivitas, kelestarian dan tidak ada konflik (Tadjudin, 2000).

METODOLOGI

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan peserta yang berasal dari Forum Kawasan, Wana Dharma, Wana Lestari, Wana Abadi, Wana Dharma, dan Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH).

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta yang berasal dari berbagai pihak yang berkepentingan. Jumlah peserta dalam diskusi ini berjumlah 71 orang dengan perwakilan masing-masing pihak. Waktu pelaksanaan dilakukan pada tanggal 11-13 Agustus 2014.

Adapun tahapan proses kegiatan yang telah dilakukan selama 3 hari adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Proses Penyusunan FGD

HASIL PENELITIAN

a. Gambaran Umum Perencanaan Kelompok

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kehutanan di daerah kawasan hutan merupakan elemen utama dalam implementasi kebijakan disektor kehutanan. Konsep perencanaan yang disusun haruslah meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan tersebut.

Salah satu strategi yang saat ini marak di dorong oleh parapihak untuk meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kehutanan yaitu dengan mengembangkan sistem perencanaan partisipatif. Secara konseptual perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki.

Saat ini inisiasi pengembangan perencanaan partisipatif sedang di gagas oleh masyarakat dikawasan hutan sesaot kabupaten Lombok Barat. Perencanaan tersebut dikemas dalam bentuk perencanaan ditingkat kawasan yang mengelaborasi semua kepentingan kelompok masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Perencanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan membimbing perencanaan-perencanaan yang selama ini masih disusun secara parsial oleh masyarakat.

b. Kelompok Tani Wana Lestari

Kelompok tani wana lestari merupakan kelompok yang dibentuk Agustus 2003, kelompok ini beranggotakan 920 Petani yang menggarap lahan dikawasan hutan sesaot. Perencanaan yang disusun kelompok wana lestari ini lahir dari proses partisipasi yang cukup panjang dan berjenjang mulai dari tingkat penggarap, tingkat blok dan tingkat pengurus kelompok besar. Proses tersebut diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan seluruh anggota kelompok tersebut. Secara umum mengenai gambaran perencanaan yang telah disusun dibagi dalam tiga aspek; yaitu aspek tatakelola kelembagaan, tatakelola usaha dan tatakelola kawasan.

Program penguatan kelembagaan yang terdiri dari

1. Pengawasan proses perijinan HKm
Kegiatan ini dinilai sebagai sebuah langkah strategis bagi kelompok, karena sampai saat ini sebagian besar petani penggarap yang tergabung dalam kelompok wana lestari belum mendapatkan ijin definitif dari pemerintah mengenai wilayah kelolanya, diharapkan dengan perencanaan ini semua anggota kelompok bisa memperoleh ijinnya dengan cepat dan sistematis.

2. Penguatan kelembagaan kelompok
Penguatan kelembagaan kelompok memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kinerja kelompok. Ruang lingkup penguatan kelembagaan ini meliputi penyusunan perencanaan kelompok dan pembangunan sekretariat, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan kelompok dapat dijalankan secara sistematis serta terkontrol melalui satu pusat informasi yang disebut sekretariat kelompok.

Program pengelolaan kawasan terdiri dari

1. Pemetaan Lahan Garapan Di Masing-Masing Blok
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperjelas batas wilayah lahan garapan masing-masing blok dalam kelompok yang berjumlah 22 blok. Dengan demikian jika wilayah kelola masyarakat sudah dapat dipetakan dengan baik maka tidak ada lagi kasus maupun konflik perebutan lahan antar anggota dalam kelompok, dan anggota juga dapat dengan tenang mengelola dan menikmati hasil dari lahan garapan tersebut.
2. Rehabilitasi Lahan Hutan
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah satu elemen terpenting dalam mengoptimalkan fungsi hutan baik fungsi produksi, konservasi maupun fungsi sosialnya. Oleh karena itu rencana rehabilitasi tersebut diarahkan pada dua kegiatan utama yaitu penanaman pohon pada wilayah kelola yang di anggap rawan dengan ancaman longsor, banjir, dan lahan-lahan yang dianggap memiliki tingkat kekritisian lahan cukup tinggi. Selain reboisasi, juga dilakukan pengkayaan-pengkayaan jenis tanaman unggulan lokal seperti durian, manggis, rambutan pada titik-titik yang dianggap tingkat kerapatan tanamannya masih jarang.
3. Pengukuran Karbon
salah satu trend pengembangan pengelolaan jasa lingkungan yang bersumber dari hutan diarahkan pada mekansime perdagangan karbon, hal tersebut menarik perhatian anggota kelompok untuk mencoba meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menilai kandungan karbon yang terdapat di wilayah kelolanya. Dengan tujuan agar ketika nantinya skema ini memang benar adanya, maka masyarakat telah memiliki kemampuan dan database mengenai kandungan karbon yang terdapat di wilayahnya.
4. Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
Kegiatan perlindungan hutan dan Konservasi alam merupakan salah satu kegiatan yang

rutin yang akan dilaksanakan kelompok dari tahun ketahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan wilayah kelola masyarakat dari ancaman pencurian dan perampasan lahan-lahan kelompok.

Program peningkatan ekonomi yang terdiri dari :

1. Pelatihan Pengelolaan HHBK
Pelatihan ini dianggap sangat penting dan mendesak bagi masyarakat untuk dilakukan, mengingat potensi Hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berada di wilayah kelolanya sangat tinggi, namun ketersediaan potensi tersebut tidak dibarengi dengan keterampilan dan mekansime pengelolanya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh potensi sumberdaya hutan khususnya HHBK yang terdapat di wilayah tersebut dapat di manfaatkan dengan baik sehingga bisa meningkatkan perekonomian kelompok untuk jangka panjang. Beberapa pelatihan yang ingin dilakukan oleh masyarakat meliputi :
a) Pelatihan pengemasan dan pemasaran produk HHBK
b) Fasilitasi perijinan PIRT dan lebel Halal
c) Pelatihan peningkatan keterampilan kelompok
d) Pelatihan kerajinan bambu
e) Pelatihan pengolahan aren
2. Pelatihan Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat
Selain potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu, di wilayah kelompok juga terdapat beberapa objek wisata yang sering di kunjungi oleh masyarakat. Jika dimanfaatkan dengan baik potensi ini bisa memberikan manfaat ekonomi yang cukup tinggi bagi anggota kelompok. Namun hal tersebut belum bisa dimaksimalkan, mengingat kapasitas dan keterampilan anggota kelompok masih sangat terbatas. Sehingga mereka berinisiatif untuk membuat beberapa pelatihan bekerjasama dengan parapihak yang terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan objek wisata tersebut. Pelatihan – pelatihan yang dimaksud yaitu :
a) Pembukaan jalur destinasi wisata
b) Pelatihan Desain Tingkat Tapakapak
3. Pengembangan usaha ekonomi kelompok (simpan pinjam)
Selain menyelenggarakan pelatihan, kelompok juga berencana untuk membentuk suatu unit usaha mandiri yang murni dikelola oleh masyarakat dalam bentuk koperasi simpan-pinjam. Unit usaha ini nantinya diharapkan dapat membantu permodalan anggota kelompok dalam meningkatkan produktifitas lahannya, serta dapat

memberikan pendidikan mengenai manajemen keuangan terhadap anggota kelompok sehingga perencanaan keuangan mereka bisa lebih tertata dengan baik.

c. Kelompok Tani Wana Abadi

Kelompok tani wana abadi merupakan salah satu kelompok besar yang berada di wilayah kawasan hutan sesaot, anggotanya mencapai 1500 orang. Wilayah kelola kelompok ini meliputi dua status kawasan hutan yaitu kawasan hutan lindung yang menjadi wilayah kelola Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan wilayah Taman Hutan Raya (TAHURA) yang menjadi kewenangan provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam proses perencanaannya kelompok ini mengkolaborasi kegiatan-kegiatan yang terdapat pada dua status kawasan hutan tersebut kedalam suatu sistem perencanaan meliputi :

Program penguatan kelembagaan yang terdiri dari :

1. Pertemuan untuk semua blok.
Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyusun kembali mekanisme kelembagaan yang sempat facum. Beberapa agenda yang akan di lakukan dalam pertemuan tersebut yaitu perubahan struktur kepengurusan kelompok, memperbaiki dan melaksanakan kembali awig-awig yang telah disusun, termasuk dengan melakukan pendataan ulang anggota-anggota kelompok. Dengan kegiatan ini diharapkan kelompok mampu bangkit dan mengawal mekanisme pengelolaan sumberdaya lahan di tingkat blok dengan baik.
2. Pelatihan peningkatan kapasitas.
Inisiasi pelatihan peningkatan kapasitas dalam membangun sebuah kelembagaan yang baik menjadi hal yang mutlak dan mendesak untuk dilakukan oleh kelompok wana abadi, mengingat saat ini kondisi kelembagaan kelompok tani wana abadi masih fakum, tidak lepas dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman kelompok terkait dengan mekanisme pengelolaan kelompok yang baik.

Program pengelolaan kawasan yang terdiri dari :

1. Pembibitan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan bibit untuk memenuhi kebutuhan kelompok, sehingga ketika ada program kelompok tidak lagi membeli bibit dari kelompok lain. Rencananya pembibitan ini akan dilaksanakan setiap tahun dengan mengharapkan bantuan dari parapihak yang berkepentingan seperti DISHUT, TAHURA dan Lembaga Mitra
2. Penanaman
Kegiatan penanaman ini di maksudkan untuk merehabilitasi kawasan-kawasan yang

dianggap memiliki tingkat kekritisasi tinggi terutama yang berada daerah-daerah rawan seperti sempadan sungai, tebing-tebing dan lain-lain. Pelaksanaan penanaman ini rencananya akan dilaksanakan setiap tahun dan bekerjasama dengan dinas kehutanan serta lembaga mitra lainnya.

3. Perlindungan dan pengamanan hutan
Kegiatan perlindungan hutan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin stabilitas fungsi ekosistem hutan yang termasuk dalam wilayah garapan kelompok dengan cara bersama-sama melakukan monitoring dan patroli kawasan bersama petugas dan lembaga mitra. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam kelompok wana abadi.

Program peningkatan ekonomi yang terdiri dari :

1. Pembentukan koperasi simpan pinjam
Pembentukan koperasi simpan pinjam nantinya diharapkan dapat membantu permodalan anggota kelompok dalam meningkatkan produktifitas lahannya, dan dapat membantu dalam menggerakkan roda kelembagaannya sehingga perencanaan keuangan kelompok bisa lebih tertata dengan baik.
2. Pengelolaan HHBK
Selain potensi kayu, dilahan-lahan anggota kelompok wana abadi terdapat potensi-potensi HHBK yang sangat memungkinkan untuk di kembangkan. Namun dalam pengembangannya, kemampuan masyarakat disadari masih sangat terbatas. Sehingga untuk meningkatkan kapasitas mereka, kelompok mengajukan sebuah kegiatan dalam bentuk pelatihan pengelolaan HHBK mulai dari produksi, pengemasan sampai pada proses pemasarannya. Dengan harapan bahwa nantinya ketika produk tersebut sudah memiliki nilai jual yang tinggi kesejahteraan masyarakat dapat meningkat juga.
3. Pengelolaan ekowisata
Selain potensi HHBK dalam bentuk produk kemasan, di wilayah kelompok wana abadi terdapat beberapa objek wisata yang sering dimanfaatkan masyarakat, namun sampai saat ini pengelolaannya masih dilakukan secara sederhana. Untuk memaksimalkan manfaat dari potensi tersebut kelompok wana abadi mencoba melakukan beberapa kegiatan seperti :
 - a) Menghidupkan kembali wisata air terjun segender dan pengkoak
 - b) Menarik wisatawan mancanegara dan lokal untuk berkunjung ke airterjun tersebut.
 - c) Membangun pusat penjualan HHBK sebagai salah satu daya tarik wisatawan

d. Kelompok Tani Wana Dharma

Kelompok tani wana dharma merupakan salah satu kelompok tani yang memiliki lahan garapan di kawasan hutan sesaot. Kelompok ini memiliki jumlah anggota yang cukup besar hingga mencapai 1200 orang. Untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan lahannya kelompok wana dharma telah menyusun rancangan kegiatan yang dikemas dalam bentuk perencanaan 5 tahunan dengan beberapa program utama meliputi :

Program penguatan kelembagaan yang terdiri dari :

1. Konsolidasi Kelompok
Konsolidasi kelompok menjadi salah satu agenda prioritas bagi kelompok wana dharma, hal ini dimaksudkan untuk membangun kembali komitmen anggota kelompok yang sudah mulai berkurang akibat lemahnya sistem kelembagaan yang ada ditingkat kelompok. Salah satu langkah nyata yang akan dikembangkan dalam mendukung kegiatan kelompok tersebut yaitu dengan mulai mengaktifkan kembali pertemuan-pertemuan rutin ditingkat kelompok maupun di tingkat blok sebagai media komunikasi dan koordinasi antar anggota kelompok.
2. Penguatan Awig-Awig
Selama ini kelompok wana dharma telah memiliki awig-awig yang menjadi pedoman kelompok dalam mengerjakan roda organisasinya. Namun dalam pelaksanaannya lapangan awig-awig tersebut kurang di patuhi oleh anggota kelompok. Sehingga ada inisiatif untuk mereview dan memperkuat kembali keberadaan awig-awig tersebut agar bisa dijalankan dengan konsisten.
3. Penataan Areal Kelola Blok
Kegiatan penataan areal kelola pada masing-masing blok menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan yang disusun, hal ini dimaksudkan agar setiap anggota kelompok memiliki kejelasan terhadap wilayah kelolanya.

Program pengelolaan kawasan yang terdiri dari :

1. Fasilitasi Perijinan HKm
Rencana fasilitasi perijinan HKm di maksudkan untuk memperjelas status wilayah kelola kelompok, mengingat selama ini semua anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani wana dharma belum memperoleh kejelasan status mengenai lahan garapannya. Sehingga kegiatan ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan.
2. Restorasi dan Konservasi
Kegiatan restorasi dan konservasi ini dimaksudkan untuk merehabilitasi dan

memelihara kondisi sumberdaya lahan yang dinilai cukup kritis dan rawan terhadap ancaman-ancaman bencana longsor dan banjir, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra dan instansi terkait seperti dinas kehutanan, KPH dan lain-lain.

3. Penataan Kawasan Wisata

Selain potensi HHK dan HKm di wilayah kelompok wana dharma juga terdapat objek-objek wisata yang sering dikunjungi masyarakat. Objek tersebut saat ini dikelola dengan sistem yang masih sangat sederhana. Untuk memaksimalkan manfaat dari keberadaan potensi wisata tersebut kelompok berencana melakukan penataan kawasan wisatanya dengan harapan ketika nanti kawasan tersebut sudah tertata pengunjung bisa lebih banyak lagi datang ketempat tersebut.

Program peningkatan ekonomi terdiri dari :

1. Mendorong Pengembangan Koperasi
Saat ini di wilayah kelompok tani wana lestari sudah terbentuk koperasi yang diharapkan mampu mendorong usaha masyarakat. Namun peran dan fungsinya dirasakan belum optimal. Sehingga dalam perencanaan ini kelompok mencoba menginisiasi dan mendesain koperasi tersebut menjadi pusat perekonomian kawasan, sehingga dampak dari keberadaan koperasi tersebut bisa dirasakan oleh seluruh anggota kelompok.
2. Pembuatan Stand Buah Tradisional
Saat ini berbagai komoditas buah dan sayuran sudah dihasilkan dari lahan garapan anggota kelompok. Namun kelimpahan produksi tersebut belum ditunjang dengan sistem promosi yang baik. Sehingga untuk mendorong upaya promosi tersebut, kelompok berencana untuk membangun stand buah dan kuliner tradisional. Rencana ini diharapkan dapat meningkatkan pemasaran produk kelompok dan mampu menjadi daya tarik wisata baru di wilayah kelompok.
3. Peningkatan Kapasitas Dan Keterampilan Kelompok.
Tingginya hasil produksi dari lahan-lahan kelompok, belum dibarengi dengan keterampilan anggota kelompok dalam mengelola hasil-hasil tersebut dan produk yang di hasilkan pun belum begitu mampu untuk bersaing di pasaran, sehingga dalam menyusun perencanaan kelompok ini dimasukan juga upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok dalam mengelola hasil lahan mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai dan

pemasaran dari produk-produk yang di hasilkan.

e. Kelompok Tani KMPH

Kelompok KMPH merupakan salah satu kelompok pengelola lahan yang cukup lama di kawasan hutan sesaot. Kelompok ini dibentuk sejak tahun 1995 dan memiliki jumlah anggota mencapai 1224 orang. Sehingga untuk memaksimalkan pengelolaannya dibutuhkan sebuah perencanaan yang sistematis dan matang. Secara umum Perencanaan kelompok KMPH disusun berdasarkan tiga program prioritas utama yaitu :

Program penguatan kelembagaan yang terdiri dari :

1. Konsolidasi di Tingkat Pengurus
Konsolidasi ditingkat kelompok merupakan salah satu kegiatan yang paling mendesak untuk dilakukan kelompok KMPH, mengingat selama ini komitmen anggotanya dalam menjalankan roda organisasi sudah mulai berkurang, sehingga diperlukan sebuah upaya konsolidasi yang lebih baik di tingkat kelompok dalam bentuk pertemuan rutin di tingkat kelompok besar dan ditingkat blok.
2. Fasilitasi Perijinan di Wilayah KMPH
Kegiatan ini di pilih mengingat sampai saat ini sebagian anggota kelompok blum memperoleh ijin penggunaan lahan dari pemda setempat. harapanya dengan memperoleh ijin tersebut kelompok mendapatkan kepastian mengenai status wilayah kelola mereka.
3. Pelatihan Pembuatan Proposal
Kegiatan ini di usulkan untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan ke lembaga mitra maupun instansi terkait. Kelompok menyadari bahwa untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki di butuhkan dukungan nyata dari parapihak baik dalam bentuk program maupun pembinaan yang intensif.

Program pengelolaan kawasan yang terdiri dari :

1. Restorasi Mata Air Dan Bantaran Sungai
Kegiatan restorasi merupakan salah satu kegiatan yang direncanakan oleh kelompok, hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistem dari maraknya aktifitas di sekitar kawasan. Kegiatan ini diarahkan pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan dan rentan terhadap ancaman-ancaman bencana, seperti mata air dan daerah sempadan sungai.
2. Pengkayaan Tanaman
Kegiatan pengkayaan tanaman secara umum dilakukan untuk menambah variasi jenis tanaman yang ada di lahan garapan kelompok,

total tanaman yang akan di tanam rencananya mencapai 45.000 pohon pada lahan seluas 45 hektar.

3. Penataan Peta Blok

Untuk memastikan status dan kejelasan wilayah kelola antar blok, kelompok berencana untuk melakukan pendataan dan pemetaan kembali wilayah kelola masing-masing blok. Sehingga tidak ada lagi konflik akibat perebutan lahan kelola dan memudahkan control terhadap penggunaan lahan tersebut.

Program peningkatan ekonomi yang terdiri dari :

1. Pelatihan Peningkatan Keterampilan
Pelatihan peningkatan keterampilan dianggap sangat penting untuk dilakukan kelompok, karena selama ini jumlah hasil kawasan yang melimpah tidak dibarengi dengan keterampilan anggota kelompok yang memadai terkait dengan teknik pascapanen dan pemasarannya. Sehingga produk/hasil olahan yang dibuat kelompok masih bernilai ekonomi rendah.
2. Pengembangan Pupuk Organik
Selain mengadakan pelatihan, untuk menambah pedapatan anggotanya, kelompok berencana untuk mengmebangkan pupuk organik dan budidaya lebah madu. Hal ini dilakukan didasarkan atas pertimbangan tinginya kebutuhan pupuk dan pasarnya juga tidak hanya dikalangan petani melainkan bisa dikirim juga ke kota maupun daerah lain. Sedangkan lebah madu dikembangkan atas dasar tingginya tingkat permintaan madu asli dan alami dari para konsumen, apalagi NTB juga sudah dikenal sebagai salah satu sentra madu di Indonesia.

f. Kelompok Forum kawasan Hutan Sesaot

Forum kawasan sesaot merupakan salah satu lembaga di tingkat kelompok masyarakat yang dibentuk sejak tahun 2006 dengan tujuan untuk mengawal dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan di tingkat kelompok baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penegakan aturan main di tingkat kawasan. Sebagai sebuah lembaga yang bertugas untuk memediasi di tingkat kawasan, perencanaan forum juga harus disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan program di tingkat kelompok meliputi :

1. Program penguatan kelembagaan yang diarahkan untuk memaksimalkan peran kelembagaan kelompok dalam mengatur dan mengorganisir anggotanya, dengan tujuan agar roda kelembagaan kelompok dapat berjalan dengan terencana, sistematis dan didasari dengan komitmen yang kuat dari para anggotanya.

2. Program pengelolaan kawasan merupakan program yang diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan wilayah kelola kelompok, dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hasil tanaman sekaligus tetap memperhatikan kelestarian kondisi sumberdaya hutan di wilayah tersebut.
3. Program peningkatan ekonomi merupakan salah satu arahan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan produktifitas dan kapasitas kelompok dalam mengolah sumberdaya lahan dan produk olahannya, Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok.

g. Mekanisme dan Skema

Dalam proses penyusunan perencanaan bersama di tingkat kawasan hutan sesaot, juga disepakati mengenai mekanisme dan pengawalan perencanaan yang telah disusun, agar proses pengawalan perencanaan ini dapat berjalan sistematis maka dibentuklah sebuah tim yang bertugas untuk mengawal kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun. Nantinya tim ini diharapkan dapat menjadi katalisator antara lembaga-lembaga mitra, instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan sesaot.

Dalam perencanaan bersama tersebut juga di jabarkan tentang pembagian peran, tugas dan wewenang masing-masing pihak/aktor yang berakutifitas didalam kawasan hutan. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Level Pihak/Aktor	Wewenang	Peran/tanggung jawab
Tingkat kawasan (tim/Pokja/dll)	- Memberikan Rekomendasi	- Fasilitasi - Mediasi - Koordinasi - Evaluasi - Asistensi - Supervisi
Tingkat Kelompok Besar (Pengurus Kelompok Besar)	- Membuat keputusan - Memberikan sanksi	- Koordinasi tingkat kelompok - Sosialisasi program - Memperkuat kelembagaan - Memberikan pembinaan terhadap blok - Monev terhadap blok
Tingkat Blok	- Mengusulkan program	- Melaksanakan program - Melaporkan program - Mempertanggungjawabkan program yang sudah diusulkan

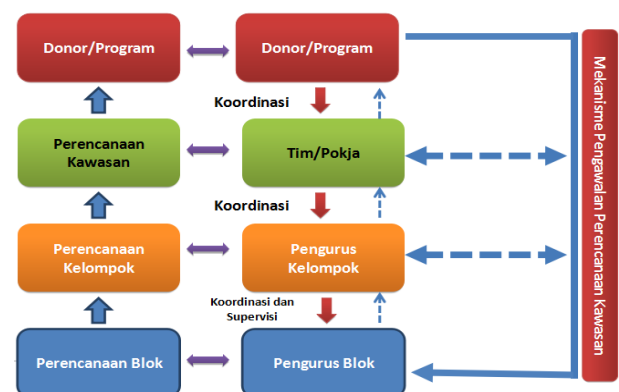
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembagian peran masing-masing aktor cukup jelas, mulai dari tingkat kawasan sampai pada tingkat blok. Pembagian tersebut dapat dilihat bahwa peran masing-masing aktor dirasakan sangat strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan dikawasan hutan sesaot. Khususnya pada tingkat kawasan, karena pada tingkatan ini arah dan

program di tingkat kawasan di jalankan, mulai dari pengawalan proses perencanaan sampai pada proses monitoring dan evaluasinya.

Peran ini secara teknis akan dijalankan oleh tim mitra penyelaras kawasan hutan sesaot yang sudah dibentuk atas kesepakatan bersama masyarakat dan parapihak. Tim ini terdiri dari berbagai unsur baik perwakilan kelompok, pemerintah desa, pemerintah daerah, forum kawasan, tokoh perempuan dan pemuda yang berada di lingkaran kawasan hutan sesaot dan mampu menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan yang diamanatkan sebagai berikut :

1. Melakukan fasilitasi terhadap kelompok-kelompok dalam hal pengusulan proposal, mekanisme pelaporan dan perijinan-perijinan di tingkat kawasan seperti hak kelola.
2. Melakukan proses Mediasi terhadap konflik-konflik yang terjadi ditingkat kawasan khususnya menyangkut pengelolaan sumberdaya lahan.
3. Melakukan Koordinasi program dan kegiatan di tingkat kawasan dengan parapihak yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
4. Melakukan Asistensi dalam bentuk pendampingan dan pembinaan teknis kepada kelompok terkait dengan penguatan kelembagaan, sosialisasi dan konsolidasi
5. Melakukan Supervisi dalam bentuk penilaian dan penjarangan usulan program dari kelompok melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program-program yang akan dijalankan dan
6. Melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah dan sedang berjalan di dalam kawasan hutan sesaot.

Untuk memaksimalkan peran dan fungsi tim tersebut, maka di bangun sebuah skema pengawalan di tingkat kawasan yang memastikan proses-proses yang akan dibangun berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dalam hal ini skema yang disepakati meliputi :



Gambar diatas memberikan gambaran bahwa program dilaksanakan pada tingkat blok, melalui proses filterisasi dan koordinasi dengan tim di

tingkat kawasan dengan mengacu pada perencanaan yang telah disusun. Kemudian pelaksanaan program tersebut dievaluasi oleh kelompok besar berkoordinasi dengan tim di tingkat kawasan dan sponsor/mitra pemberi program.

PENUTUP

a. Simpulan

Kelompok besar di kawasan hutan sesaot memiliki rencana pengelolaan program yang telah disusun dengan baik. Rencana pengelolaan program yang terdapat pada kelompok besar memiliki jenis kebutuhan yang sama. Skema komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar blok dipegang oleh lembaga yang mengakomodir semua kelompok dan kawasan hutan sesaot.

b. Saran

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari proses perencanaan bersama ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil-hasil dari perencanaan bersama ini diharapkan dapat diintegrasikan kedalam dokumen RPJMDES dan rencana kerja SKPD agar betul-betul bisa terlaksana.
2. Perlu adanya sosialisasi dan dengar pendapat kepada parapihak terutama di lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga mitra mengenai kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun agar bisa memperoleh legitimasi yang lebih kuat.
3. Perlu proses penguatan kapasitas pada setiap level aktor baik di tingkat kawasan, kelompok besar maupun tingkat blok agar mekanisme yang dibangun berjalan seimbang dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi dan Santoso. 1993. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Walhi. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2002. Memorandum Administrasi Proyek Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Miskin Melalui Inovasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Dinas Kehutanan Lombok Barat. 2009. Laporan Tahunan 2009.
- Fisher Simon, Jawed L, Williams S, Dekha I, Richard S, Sue W. 2000. Working With Conflict : Skills and Strategies For Action. The British Council Indonesia.

Francis Fukuyama. 1999. The Social Value and the Creation of Prosperity. New York Free Press.

Nikijuluw VPH. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. P3R. Jakarta.

Markum, 2001. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di NTB. Makalah Workshop Multipihak dalam Kerangka National Forest Programme. Mataram.

Markum, Eko Bambang Sutedjo, M Ridha Hakim. 2004. Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Pulau Kecil : Kasus Pulau Lombok. WWF Indonesia Program Nusa Tenggara. Mataram

MacKinnon, J., K. MacKinnon, G. Child, and J. Thorsell. 1993. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Marzuki, 1997. Profil Kemiskinan dan Pendekatan Penyuluhannya di Lampung. (disertasi) Program Pascasarjana-Institut Pertanian Bogor, Bogor.

NRTEE, 1998. Sustainable Strategies for Oceans: a Co-management Guide. National Round Table on the Environment and the Economy. Ontario.

Sutomo Slamet, 1995. Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah (disertasi) Program Pascasarjana-Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Saharuddin dan Sumardjo, 2004. Metode-Metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Sarman M. 1997. Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Prisma, 1 Januari 1997.

Soekmadi R. 2004. Perencanaan Kawasan Konservasi. Materi Kuliah Manajemen Kawasan Konservasi. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan IPB. Bogor.

Tadjudin, 2000. Manajemen Kolaboratif. Pustaka Latin. Bogor.